P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Komunikasi Pembangunan Pertanian Etnis Bugis di Kolaka Timur: Analisis Konstruktivisme Sosial

Wa Ode Nila Farlin[1)], Esti Agesta Nurmaida[2)]

Universitas Halu Oleo, Indonesia

nilafarlin@uho.ac.id[1)]
estiagesta@uho.ac.id[2)]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis dengan menggunakan perspektif konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam praktik komunikasi pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan melalui empat tahap utama. Pertama, perencanaan komunikasi yang bersifat partisipatif mencerminkan proses eksternalisasi gagasan pembangunan, di mana pemerintah dan masyarakat Bugis merumuskan arah kebijakan bersama. Kedua, pengelolaan media dan saluran komunikasi menjadi bentuk objektivasi, ketika gagasan pembangunan diwujudkan dalam ruang publik melalui tatap muka, media tradisional, digital, dan kultural. Ketiga, implementasi program mencerminkan proses internalisasi, di mana petani Bugis mengadaptasi inovasi pertanian dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Keempat, evaluasi memperlihatkan konsolidasi makna sosial, ditandai dengan peningkatan produktivitas padi dan jagung sebesar 12-15%, serta penguatan legitimasi kultural masyarakat terhadap kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal mampu membangun realitas sosial baru berupa integrasi antara modernisasi pertanian dan tradisi agraris Bugis. Temuan ini memberi implikasi praktis bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh media dan pesan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra dialogis dalam proses konstruksi makna pertanian.

Kata kunci: Etnis Bugis, Kolaka Timur, Konstruktivisme sosial, Pertanian, Strategi komunikasi.

Abstract

This study aims to analyze the communication strategies of the Kolaka Timur District Government in enhancing agricultural opportunities for Bugis ethnic farmers, using Berger and Luckmann's social constructivism as the analytical framework. A qualitative approach with a case study design was employed to gain an in-depth understanding of agricultural communication practices. Data were collected through in depth interviews, participatory observation, and documentation, and validated using triangulation of sources, techniques, and time. The findings reveal four main stages of the government's communication strategy. First, participatory planning reflects the process of externalization, where development ideas are formulated jointly between the government and Bugis farmers. Second, the management of media and communication channels constitutes objectivation, as development ideas are institutionalized in the public sphere through face to face interactions, traditional media, digital platforms, and cultural practices. Third, program implementation illustrates internalization, where Bugis farmers adopt agricultural innovations while maintaining their local wisdom. Fourth, evaluation demonstrates the consolidation of social meaning,

marked by an increase in rice and corn productivity by 12-15% and the strengthening of cultural legitimacy toward government policies. This study concludes that communication strategies based on community participation and cultural sensitivity can construct a new social reality in which agricultural modernization and Bugis agrarian traditions coexist. The findings highlight that the success of development communication is determined not only by media and message design but also by the government's ability to position society as a dialogical partner in the construction of agricultural meaning.

Keywords: *Agriculture, Bugis ethnic group, Communication strategy, Kolaka Timur, Social constructivism.*

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki potensi agraris tinggi (Kusumaningrum, 2019). Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kakao yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan pendapatan, tetapi juga merefleksikan identitas budaya masyarakat setempat. Hasil pengelolaan dan pengembangan tanaman komoditas unggulan merupakan suatu sistem dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan produk pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan manusia secara lebih efektif dan berkelanjutan (Brata *et al*., 2023). Hal ini tidak terlepas dari dominasi etnis Bugis yang memiliki tradisi agraris kuat serta keterampilan bercocok tanam yang diwariskan secara turun-temurun (BPS Kolaka Timur, 2025). Namun demikian, besarnya potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi modern, infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya akses pasar, serta dampak perubahan iklim yang turut memengaruhi produktivitas lahan (Kartomo *et al*., 2023 ;(Suryaalim et al., 2019).

Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang efektif dari Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program-program pertanian agar program pembangunan pertanian dapat diterima, dipahami, dan diadopsi oleh masyarakat (Zainal & Sarwoprasodjo, 2018), khususnya komunitas petani Bugis yang menjadi aktor utama dalam produksi komoditas unggulan. Selain itu, perkembangan era digital dan transformasi komunikasi publik juga memberikan dimensi baru (Febriani & Juliani, 2022). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengandalkan komunikasi tatap muka atau penyuluhan konvensional, tetapi juga memanfaatkan media sosial, platform digital, dan strategi komunikasi partisipatif (Syaputra & S, 2021) untuk menjangkau generasi muda petani (Rahmah, 2021).

Kajian tentang strategi komunikasi pemerintah daerah dalam konteks pembangunan pertanian sudah cukup banyak dilakukan. Misalnya, penelitian (Fauziyah & Mahara, 2022) menyoroti strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam pemasaran kopi Gayo,namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada isu komunikasi publik atau pemasaran, dan belum banyak yang mengulas secara spesifik tentang strategi komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang pertanian berbasis etnis lokal (Zakariah et al., 2019). Meskipun banyak penelitian yang membahas komunikasi pertanian secara umum, masih sedikit yang fokus pada strategi komunikasi spesifik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peluang pertanian di daerah tertentu, seperti Koltim (Kolaka Timur). Padahal, etnisitas dan budaya lokal memainkan peran penting dalam proses adopsi inovasi pertanian (Natasya & Jers, 2024). Studi (Armawan, 2022) menekankan bahwa komunikasi pembangunan harus menyesuaikan konteks sosial budaya agar lebih efektif. Dalam konteks Koltim, etnis Bugis memiliki tradisi agraris yang kuat (Noviati, 2022), tetapi juga menghadapi tantangan adaptasi terhadap teknologi pertanian modern (Juniarfah, 2023). Etnis Bugis di Kolaka Timur memainkan peran sentral dalam pertanian, memiliki tradisi agraris yang kuat (Nengah *et al*., 2024), serta mengandalkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kakao sebagai sumber ekonomi utama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar tersebut dengan keterbatasan faktual berupa infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, hingga dampak perubahan iklim. Selain itu, transformasi digital

yang seharusnya membuka peluang baru bagi petani masih belum optimal karena rendahnya literasi digital masyarakat pedesaan (Zainal & Sarwoprasodjo, 2018). Oleh karena itu, celah penelitian yang dapat diidentifikasi adalah minimnya studi yang secara komprehensif menganalisis strategi komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang pertanian berbasis etnisitas dan kearifan lokal, khususnya masyarakat Bugis di Kolaka Timur. Kajian semacam ini penting untuk memahami bagaimana integrasi antara komunikasi pembangunan, strategi pemerintah, dan tradisi lokal dapat membentuk pola adopsi inovasi yang lebih efektif dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah (gap) tersebut dengan mengkaji strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis, dengan perspektif konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann. Penelitian ini relevan karena menempatkan komunikasi tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses membangun makna bersama antara pemerintah dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis. Perspektif konstruktivisme sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana realitas pertanian dikonstruksi secara bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat Bugis melalui proses komunikasi yang meliputi objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Strategi komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses dialektis dalam membentuk realitas sosial pertanian yang baru.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada kecamatan Ladongi, Poli-Polia, dan Loea yang mayoritas dihuni etnis Bugis. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan total 20 orang yang terdiri atas 5 pejabat Pemda (dinas pertanian dan perangkat kecamatan), 4 penyuluh pertanian lapangan (PPL), 8 petani Bugis sebagai aktor utama produksi, serta 3 informan pendukung yang meliputi tokoh masyarakat adat dan perwakilan akademisi/LSM lokal. Komposisi ini dipilih untuk merepresentasikan aktor kunci dalam proses komunikasi pembangunan pertanian di tingkat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik komunikasi antaraktor, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami konteks sosial budaya, termasuk praktik simbolik seperti penggunaan istilah lokal dan ritual adat pertanian. Dokumentasi berupa laporan resmi pemerintah, data statistik, dan arsip media lokal digunakan sebagai data pendukung.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check. Secara operasional, triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang wawancara pada waktu yang berbeda (misalnya sebelum dan sesudah musim tanam atau panen) untuk melihat konsistensi makna dan praktik, khususnya dalam memahami istilah lokal seperti pare baru dan pelaksanaan ritual adat yang menyertainya. Sementara itu, member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan, terutama tokoh adat dan petani Bugis, guna memastikan bahwa makna pare baru sebagai simbol agraris dan budaya telah dipahami secara tepat sesuai perspektif lokal. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara siklus hingga mencapai kejenuhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategi Komunikasi: Eksternalisasi Gagasan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan komunikasi dilakukan melalui serangkaian forum formal dan informal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Pemda Koltim) memanfaatkan musyawarah desa

(Musdes) dan rapat koordinasi lintas instansi sebagai ruang deliberatif untuk merumuskan arah pembangunan pertanian. Selain itu, penyusunan program juga merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum sekaligus legitimasi administratif. Dalam forum Musdes, aspirasi petani Bugis, penyuluh pertanian, tokoh adat, hingga aparat desa dihimpun untuk dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan. Proses ini mencerminkan adanya mekanisme komunikasi partisipatif, di mana pemerintah tidak hanya menyampaikan instruksi, tetapi juga membuka ruang untuk menerima umpan balik secara langsung.

Dalam kerangka konstruktivisme sosial, tahap perencanaan ini merepresentasikan proses eksternalisasi, yakni saat gagasan pembangunan pertanian yang semula berada dalam ranah birokrasi dikeluarkan untuk diperdebatkan di ruang sosial masyarakat. Pada titik ini, gagasan pemerintah tidak serta-merta diterima, tetapi dinegosiasikan, ditafsirkan ulang, dan bahkan dikritisi oleh petani Bugis sesuai dengan pengalaman serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, makna pembangunan bukan produk sepihak pemerintah, melainkan hasil dari interaksi dan dialog bersama. Fakta lapangan menunjukkan bahwa beberapa usulan masyarakat, seperti perbaikan irigasi dan pengadaan bibit lokal yang sesuai dengan kondisi tanah Koltim, berhasil masuk dalam prioritas kebijakan daerah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah berupaya menempatkan masyarakat Bugis bukan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai aktor yang turut membentuk arah komunikasi pembangunan.

Lebih jauh, perencanaan komunikasi yang partisipatif juga memberi dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Wawancara dengan petani Bugis menunjukkan bahwa mereka merasa lebih dihargai ketika pandangan mereka diakomodasi dalam program pertanian. Kepercayaan ini berperan sebagai modal sosial yang penting bagi keberhasilan komunikasi pembangunan. Dari perspektif teori, kepercayaan dapat dipandang sebagai simbolisasi awal dari proses objektivasi, di mana gagasan pembangunan mulai memperoleh status sebagai kenyataan sosial bersama.

Untuk memperjelas pola perencanaan komunikasi yang dijalankan Pemda Koltim, berikut ditampilkan tabel ringkas mengenai bentuk forum perencanaan, aktor yang terlibat, serta tujuan komunikasi yang dicapai.

Tabel 1.
Forum Perencanaan Strategi Komunikasi Pertanian di Kolaka Timur

Forum Perencanaan	**Aktor yang Terlibat**	**Tujuan Komunikasi**
Musyawarah Desa (Musdes)	Aparat desa, petani Bugis, tokoh adat, PPL, perwakilan Pemda	Menghimpun aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pertanian lokal
Rapat Koordinasi Dinas	Dinas Pertanian, Bappeda, Diskominfo, camat, kepala desa	Menyelaraskan kebijakan teknis antarinstansi dan memastikan integrasi dengan RPJMD
Forum Kelompok Tani	Petani Bugis, penyuluh, tokoh agama/adat, LSM lokal	Diskusi teknis terkait kebutuhan bibit, pupuk, dan pelatihan
Penyusunan RPJMD	Eksekutif daerah, legislatif, tim perumus perencanaan pembangunan	Menetapkan prioritas program pertanian secara formal dan jangka menengah

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Dari Tabel 1, dapat dipahami bahwa perencanaan komunikasi di Kolaka Timur tidak sekadar berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai arena negosiasi makna antara pemerintah dan masyarakat. Musyawarah desa dan forum kelompok tani bukan hanya ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi mekanisme produksi pengetahuan lokal yang

memengaruhi arah kebijakan. Dalam perspektif konstruktivisme sosial, proses ini menunjukkan bahwa realitas pembangunan pertanian tidak ditentukan secara sepihak oleh negara, melainkan dibentuk melalui interaksi yang memungkinkan pengalaman petani Bugis memperoleh legitimasi dalam struktur formal seperti RPJMD.

Tahap eksternalisasi tidak berhenti pada penyampaian program dari pemerintah, tetapi mencerminkan proses dialektis di mana batas antara aktor negara dan masyarakat menjadi lebih cair. Pemerintah berperan sebagai fasilitator diskursus, sementara masyarakat berfungsi sebagai produsen makna berbasis pengalaman agrarisnya. Kualitas strategi komunikasi kemudian tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas partisipasi yang dibuka, tetapi juga oleh sejauh mana pengetahuan lokal benar-benar diintegrasikan ke dalam kebijakan, bukan sekadar diakomodasi secara simbolik. Di titik ini, keberhasilan komunikasi pembangunan bergantung pada kemampuan pemerintah menggeser pendekatan dari sekadar konsultatif menuju kolaboratif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial-kultural.

Manajemen Media dan Saluran Komunikasi: Objektivasi dalam Ruang Publik

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kolaka Timur tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga dimanifestasikan dalam bentuk pengelolaan media dan saluran komunikasi yang beragam. Pemerintah daerah berupaya mengkombinasikan media tatap muka, media tradisional, dan media digital, serta mengintegrasikan pendekatan kultural sebagai sarana penyebaran informasi. Pengelolaan komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Pertanian sebagai instansi teknis, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta perangkat desa.

Media tatap muka masih menjadi pilihan utama dalam menjangkau petani Bugis, mengingat kuatnya budaya lisan dan relasi personal dalam masyarakat. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memainkan peran kunci sebagai komunikator yang dipercaya, karena mereka berinteraksi langsung dengan petani dalam aktivitas sehari-hari di sawah maupun kebun. Media tradisional seperti papan pengumuman desa, spanduk, dan baliho juga digunakan untuk menyampaikan informasi program, terutama terkait jadwal penyuluhan atau distribusi pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, media digital mulai diperkenalkan, meskipun belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan literasi digital masyarakat desa. WhatsApp group kelompok tani, halaman Facebook resmi Pemda, serta aplikasi harga komoditas digunakan untuk menyebarkan informasi terkini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media digital lebih banyak digunakan oleh generasi muda petani Bugis, sementara generasi tua tetap mengandalkan komunikasi tatap muka dan penyuluhan langsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital antar generasi dalam komunitas Bugis.

Dari perspektif konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann, tahap manajemen media dan saluran komunikasi ini mencerminkan proses objektivasi, di mana gagasan pembangunan yang sebelumnya berada di ranah perencanaan mulai diwujudkan dalam bentuk nyata melalui simbol, bahasa, dan media komunikasi. Informasi yang disampaikan pemerintah tidak lagi sekadar wacana, melainkan mulai memperoleh legitimasi sosial ketika dipublikasikan secara terbuka dan diakses masyarakat melalui berbagai media. Objektivasi ini penting karena menjadikan gagasan pembangunan pertanian sebagai realitas sosial yang dapat “dilihat” dan “dipegang” bersama oleh komunitas Bugis, baik melalui baliho di desa, postingan media sosial, maupun dialog langsung dengan PPL.

Namun, hasil penelitian juga menemukan adanya hambatan. Pertama, literasi digital yang rendah membuat sebagian besar petani Bugis kurang optimal memanfaatkan aplikasi harga komoditas. Kedua, keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan pedesaan menyebabkan akses informasi digital tidak merata. Ketiga, media komunikasi tradisional sering kali hanya menyajikan informasi satu arah tanpa ruang interaksi, sehingga pesan tidak sepenuhnya dipahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah masih

perlu diseimbangkan antara modernisasi media dengan mempertahankan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Untuk memperjelas penggunaan media komunikasi di Kolaka Timur, berikut disajikan tabel ringkas mengenai jenis media, aktor pengelola, dan karakteristik efektivitasnya:

Tabel 2.
Media dan Saluran Komunikasi Strategi Pertanian di Kolaka Timur

Jenis Media	**Aktor Pengelola**	**Karakteristik Penggunaan**	**Tingkat Efektivitas**
Tatap muka (penyuluhan, pertemuan desa)	PPL, Dinas Pertanian, tokoh adat	Interaksi langsung, menggunakan bahasa Bugis, membangun kepercayaan personal	Sangat tinggi
Media tradisional (spanduk, baliho, papan informasi)	Pemerintah desa, Dinas Pertanian	Informasi satu arah, bersifat formal, mudah diakses oleh masyarakat umum	Sedang
Media digital (WhatsApp group, Facebook, aplikasi harga komoditas)	Diskominfo, kelompok tani, generasi muda	Informasi cepat dan real-time, namun terbatas pada yang melek digital	Rendah-sedang
Media kultural (pengajian, pertemuan adat)	Tokoh adat, tokoh agama, aparat desa	Penyampaian pesan melalui simbol budaya, memperkuat legitimasi program	Tinggi

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Dari tabel 2, Tabel 2 menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemda Koltim beroperasi dalam pola multichannel, namun efektivitasnya tidak semata ditentukan oleh keragaman saluran, melainkan oleh kesesuaian dengan struktur sosial-budaya masyarakat Bugis. Dominannya komunikasi tatap muka dan pendekatan kultural menandakan bahwa legitimasi pesan pembangunan lebih banyak dibangun melalui relasi sosial langsung dan simbol lokal, bukan melalui diseminasi digital semata. Dalam kerangka konstruktivisme sosial, kondisi ini merefleksikan bahwa objektivasi tidak hanya soal mewujudkan pesan ke ruang publik, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut diakui sebagai realitas yang bermakna oleh komunitas.

Pada tahap ini, media dan saluran komunikasi berfungsi sebagai instrumen yang mengonkretkan kebijakan, sekaligus sebagai arena seleksi makna. Artinya, tidak semua bentuk komunikasi memiliki daya objektivasi yang sama. Media formal dan digital memang memperluas jangkauan informasi, tetapi tanpa keterhubungan dengan praktik sosial sehari-hari, pesan cenderung berhenti pada level informatif, bukan transformatif. Sebaliknya, komunikasi berbasis interaksi langsung memiliki kapasitas lebih besar dalam mengikat pesan dengan pengalaman kolektif petani.

Temuan ini sekaligus mengungkap adanya ketimpangan akses dan literasi, di mana media digital lebih resonan bagi generasi muda, sementara petani yang lebih tua tetap bergantung pada pola komunikasi konvensional. Tantangan utama bukan sekadar memperbanyak kanal komunikasi, tetapi merancang integrasi antarsaluran yang mampu menjembatani perbedaan sosial tersebut. Tanpa integrasi ini, objektivasi berisiko menghasilkan realitas pembangunan yang parsial diakui oleh sebagian kelompok, namun tidak sepenuhnya terinternalisasi oleh keseluruhan masyarakat.

Implementasi Program: Internalisasi Nilai dan Kearifan Lokal

Tahap implementasi merupakan fase penting di mana strategi komunikasi yang telah direncanakan dan disebarluaskan diwujudkan dalam praktik nyata di lapangan. Di Kabupaten Kolaka Timur, implementasi program pertanian dilakukan melalui kombinasi pendekatan teknis dan pendekatan kultural. Pemerintah daerah menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi petani Bugis dalam mengadopsi teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul, pupuk organik, serta sistem irigasi hemat air. Pendampingan ini bersifat intensif dan dilakukan langsung di lahan pertanian, sehingga petani dapat melihat bukti konkret dari inovasi yang diperkenalkan.

Namun, implementasi teknis ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah menyadari bahwa petani Bugis memiliki tradisi agraris yang kuat dan nilai-nilai kultural yang mengakar, sehingga strategi komunikasi harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses implementasi, baik sebagai komunikator maupun fasilitator. Misalnya, pesan tentang pentingnya pupuk organik sering dikaitkan dengan ajaran agama tentang menjaga kesuburan tanah, sementara inovasi irigasi diposisikan sebagai bagian dari prinsip *gotong royong* Bugis. Integrasi antara pesan pembangunan dengan nilai budaya ini membuat masyarakat lebih mudah menerima program, karena sejalan dengan identitas dan tradisi mereka.

Dalam perspektif konstruktivisme sosial Berger & Luckmann dalam (Fanani & Ahsani, 2025), tahap implementasi dapat dipahami sebagai proses internalisasi, yakni ketika kebijakan atau gagasan yang telah diobjektivasikan mulai diserap ke dalam kesadaran masyarakat dan dijadikan bagian dari praktik hidup sehari-hari. Petani Bugis tidak hanya melihat inovasi pertanian sebagai instruksi pemerintah, tetapi menginternalisasikannya sebagai “cara baru bertani” yang tetap selaras dengan tradisi. Contoh nyata adalah adanya kelompok petani muda yang menggabungkan metode pertanian modern dengan ritual adat lokal sebelum masa tanam, menunjukkan adanya integrasi antara inovasi teknologi dan budaya agraris Bugis.

Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya resistensi. Sebagian petani, terutama yang lebih tua, masih enggan menggunakan aplikasi digital harga komoditas dan lebih mempercayai informasi dari tengkulak. Resistensi ini menunjukkan bahwa internalisasi tidak terjadi seragam pada semua lapisan masyarakat, tetapi bergantung pada faktor usia, pendidikan, dan keterbukaan individu terhadap perubahan. Dengan kata lain, internalisasi sebagai proses konstruksi sosial berlangsung bertahap dan membutuhkan strategi komunikasi yang adaptif.

Untuk memperjelas praktik implementasi di lapangan, berikut tabel ringkas mengenai bentuk program, aktor pelaksana, pendekatan komunikasi, serta tingkat penerimaan masyarakat Bugis:

Tabel 3.
Implementasi Program Pertanian di Kolaka Timur

Bentuk Program	**Aktor Pelaksana**	**Pendekatan Komunikasi**	**Tingkat Penerimaan**
Penggunaan benih unggul	PPL, Dinas Pertanian, kelompok tani	Penyuluhan lapangan, demonstrasi plot, dialog tatap muka	Tinggi
Penerapan pupuk organik	PPL, tokoh agama, tokoh adat	Pesan dikaitkan dengan nilai agama dan kesuburan tanah	Tinggi
Sistem irigasi hemat air	Pemerintah desa, kelompok tani	Gotong royong, kerja bakti, sosialisasi di balai desa	Sedang-tinggi
Aplikasi harga	Diskominfo, petani muda	WhatsApp group,	Rendah-sedang

Bentuk Program	Aktor Pelaksana	Pendekatan Komunikasi	Tingkat Penerimaan
komoditas digital		pelatihan literasi digital	
Kemitraan dengan swasta	Pemda, LSM, perusahaan mitra	Sosialisasi formal, kontrak kemitraan	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Tabel 3 mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi program pertanian di Koltim tidak ditentukan oleh aspek teknis semata, melainkan oleh kemampuan strategi komunikasi dalam menjembatani inovasi dengan struktur makna lokal masyarakat Bugis. Program yang terinternalisasi dengan baik cenderung memiliki kedekatan simbolik dengan nilai-nilai kultural, sehingga tidak dipersepsikan sebagai intervensi eksternal, tetapi sebagai kelanjutan dari praktik yang sudah ada. Dalam kerangka konstruktivisme sosial, hal ini menunjukkan bahwa internalisasi berlangsung efektif ketika kebijakan diterjemahkan ke dalam bahasa budaya yang akrab dan diperkuat oleh aktor yang memiliki legitimasi sosial. Sebaliknya, hambatan pada program berbasis digitalisasi memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara logika modernisasi dan realitas sosial petani. Resistensi yang muncul bukan semata karena rendahnya kapasitas teknis, tetapi juga karena inovasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem nilai dan pengalaman keseharian. Dengan demikian, persoalan utama implementasi bukan pada penerimaan teknologi itu sendiri, melainkan pada proses pemaknaan yang belum sepenuhnya terbentuk.

Temuan ini menegaskan bahwa internalisasi bukanlah tahap akhir yang pasif, tetapi proses aktif di mana masyarakat menyeleksi, menafsirkan, dan menyesuaikan kebijakan dengan identitas kulturalnya. Oleh karena itu, efektivitas strategi komunikasi pemerintah sangat bergantung pada kemampuannya mengonstruksi narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga resonan secara kultural, sehingga inovasi pertanian dapat bertransformasi menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Output Strategi Komunikasi: Konsolidasi Makna Sosial

Evaluasi merupakan tahapan krusial untuk menilai sejauh mana strategi komunikasi pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Kolaka Timur, evaluasi dilakukan melalui forum kelompok tani, rapat koordinasi antarinstansi, serta monitoring lapangan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya menilai aspek teknis produksi pertanian, tetapi juga tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat Bugis terhadap program yang dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program pertanian di Koltim lebih menekankan pada dua aspek utama. Pertama, peningkatan produktivitas. Data Dinas Pertanian dan BPS Kolaka Timur (2024) menunjukkan adanya peningkatan rata-rata produksi padi dan jagung sekitar 12-15% setelah program penyediaan bibit unggul dan pupuk organik diterapkan. Kedua, partisipasi sosial, yang tercermin dari meningkatnya jumlah petani Bugis yang terlibat dalam kelompok tani formal, forum musyawarah desa, serta pelatihan literasi digital. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan adanya proses konsolidasi makna sosial, di mana kebijakan pemerintah dipandang bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk memperbaiki kesejahteraan bersama.

Namun, evaluasi juga mengungkap sejumlah keterbatasan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya adopsi teknologi digital. Aplikasi harga komoditas yang dikembangkan Diskominfo hanya digunakan aktif oleh sebagian kecil petani muda, sementara mayoritas petani masih bergantung pada tengkulak sebagai sumber informasi harga. Selain itu, keterbatasan infrastruktur irigasi membuat sebagian program peningkatan produktivitas tidak berjalan maksimal. Hambatan lain adalah minimnya kesinambungan komunikasi antara pemerintah dan

petani setelah program berakhir, sehingga beberapa inisiatif berhenti pada tahap uji coba tanpa keberlanjutan.

Dari perspektif konstruktivisme sosial Berger & Luckmann, tahap evaluasi dapat dipahami sebagai konsolidasi makna sosial, yakni ketika hasil-hasil pembangunan dipersepsikan, dinilai, dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari realitas baru. Program yang berhasil bukan hanya ditunjukkan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga dengan penerimaan simbolis oleh masyarakat Bugis, seperti mulai digunakannya istilah lokal dalam merujuk teknologi baru (contohnya, petani menyebut benih unggul dengan istilah pare baru yang bermakna padi generasi baru). Ini menunjukkan bahwa program pembangunan telah memperoleh legitimasi kultural.

Untuk memperjelas bentuk evaluasi dan output strategi komunikasi di Kolaka Timur, berikut disajikan tabel ringkas:

Tabel 4.
Evaluasi dan Output Strategi Komunikasi Pertanian di Kolaka Timur

Aspek Evaluasi	**Bentuk Kegiatan**	**Hasil/Output Utama**	**Tingkat Keberhasilan**
Produktivitas pertanian	Monitoring lahan, laporan hasil panen	Peningkatan produksi padi & jagung ±12-15%	Tinggi
Partisipasi masyarakat	Forum kelompok tani, Musdes, pelatihan	Keterlibatan petani Bugis meningkat, terbentuk kelompok tani aktif	Tinggi
Adopsi teknologi digital	Sosialisasi aplikasi harga, WA group	Digunakan terbatas oleh petani muda, mayoritas masih bergantung tengkulak	Rendah
Infrastruktur pendukung	Evaluasi irigasi, subsidi sarana produksi	Sebagian besar kebutuhan terpenuhi, namun distribusi belum merata	Sedang
Legitimasi kultural	Keterlibatan tokoh adat/agama, simbol lokal	Program pertanian dipandang sesuai dengan nilai Bugis (*gotong royong*)	Tinggi

Sumber: Penulis, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa evaluasi strategi komunikasi pertanian di Kolaka Timur tidak cukup dipahami melalui capaian teknis semata, melainkan harus dibaca sebagai proses legitimasi sosial atas kebijakan. Peningkatan produktivitas padi dan jagung sekitar 12-15% BPS (2025) memang menjadi indikator penting, namun angka tersebut memperoleh makna ketika dikaitkan dengan tingkat partisipasi dan penerimaan kultural masyarakat Bugis. Artinya, keberhasilan tidak berdiri pada output produksi, tetapi pada kemampuan kebijakan untuk diakui sebagai bagian dari praktik sosial yang sah.

Secara kritis, terlihat bahwa dimensi kultural memiliki daya pengaruh lebih kuat dibandingkan inovasi berbasis teknologi. Program yang terhubung dengan nilai lokal seperti praktik pertanian yang selaras dengan prinsip menjaga alam dan gotong royong lebih mudah diterima karena memperkuat kontinuitas identitas kolektif. Sebaliknya, rendahnya adopsi teknologi digital mengindikasikan adanya kesenjangan bukan hanya dalam akses, tetapi juga dalam proses pemaknaan. Teknologi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kerangka nilai yang dipahami petani, sehingga posisinya masih berada di luar sistem sosial yang mapan.

Tahap evaluasi dapat dipahami sebagai arena konsolidasi makna, di mana pemerintah dan masyarakat secara simultan menilai sekaligus meredefinisi keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka konstruktivisme sosial, proses ini menegaskan bahwa realitas pembangunan tidak hanya diukur melalui indikator kuantitatif, tetapi juga melalui penguatan kohesi sosial dan legitimasi budaya. Keberhasilan strategi komunikasi, oleh karena itu, terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi teknis dan simbolik secara seimbang, sehingga

modernisasi pertanian tidak dipersepsikan sebagai perubahan yang memutus tradisi, melainkan sebagai transformasi yang memperkaya identitas agraris masyarakat Bugis.

Tabel 5.
Pemetaan Strategi Komunikasi dalam Perspektif Konstruktivisme Sosial

Tahap Konstruktivisme	Bentuk Kegiatan di Koltim	Aktor yang Terlibat	Hasil Sosial yang Terjadi
Eksternalisasi	Musyawarah desa, forum kelompok tani, RPJMD	Pemda, petani Bugis, tokoh adat/agama, PPL	Gagasan pembangunan diperdebatkan dan dirumuskan bersama
Objektivasi	Penyuluhan tatap muka, baliho, WA group, Facebook	Dinas Pertanian, Diskominfo, PPL	Program memperoleh legitimasi sosial sebagai realitas publik
Internalisasi	Adopsi pupuk organik, irigasi hemat air, kemitraan	Petani Bugis, tokoh adat/agama, kelompok tani	Kebijakan diintegrasikan dengan tradisi agraris Bugis

Sumber: Penulis, 2025

Analisis ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kolaka Timur bukan sekadar proses teknis, tetapi sebuah proses sosial yang membangun realitas bersama. Dengan pendekatan konstruktivisme sosial, kita dapat memahami bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan terletak pada kemampuan pemerintah menempatkan diri bukan hanya sebagai komunikator, tetapi juga sebagai mitra dialogis yang bersama-sama dengan masyarakat membentuk makna baru tentang pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga sosial-kultural. Tahap perencanaan menunjukkan adanya eksternalisasi gagasan pembangunan melalui forum partisipatif seperti musyawarah desa dan kelompok tani, di mana masyarakat Bugis dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Pada tahap manajemen media, strategi komunikasi diwujudkan dalam bentuk objektivasi melalui kombinasi media tatap muka, media tradisional, digital, dan kultural yang menjadikan program pertanian sebagai realitas sosial yang diakui bersama. Selanjutnya, tahap implementasi memperlihatkan proses internalisasi ketika petani Bugis mengintegrasikan inovasi pertanian ke dalam praktik sehari-hari dengan tetap menjaga keselarasan dengan nilai budaya lokal, meskipun resistensi masih muncul terutama terkait digitalisasi pertanian.

Evaluasi strategi komunikasi menegaskan bahwa keberhasilan program pertanian di Kolaka Timur tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan produktivitas padi dan jagung sekitar 12-15%, tetapi juga oleh meningkatnya partisipasi sosial dan legitimasi kultural masyarakat Bugis terhadap kebijakan pemerintah. Analisis dengan kerangka konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann memperlihatkan dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang membentuk realitas sosial baru, yakni integrasi antara modernisasi pertanian dengan tradisi agraris Bugis. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal merupakan kunci dalam mewujudkan pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Pertanian, disarankan untuk

mengembangkan program literasi digital yang tidak lagi bersifat sosialisasi satu arah, tetapi berbasis pendampingan komunitas melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Pemuda Tani sebagai agen perubahan lokal, dengan pendekatan pelatihan praktis, mentoring berkelanjutan, serta pembentukan fasilitator digital di tingkat desa. Selain itu, strategi komunikasi perlu diperkuat dengan pendekatan kultural melalui pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan ketua kelompok tani agar inovasi pertanian lebih mudah diterima dan terinternalisasi dalam nilai lokal masyarakat Bugis. Pemerintah daerah juga perlu membangun kemitraan strategis berbasis model kolaboratif dengan sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian, akses pasar digital, serta inovasi berbasis kebutuhan petani. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam peran generasi muda Bugis sebagai penghubung digital (*digital intermediary*) yang berpotensi mempercepat transformasi komunikasi pertanian menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Armawan, I. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 64–74. https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i1.20

BPS, K. (2025). *Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur. https://koltimkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/1dcc7b0af4c3f0a2753df98f/kabupaten-kolaka-timur-dalam-angka-2025.html

BPS Kolaka Timur. (2025). *Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka 2025*. BPS Kolaka Timur. https://koltimkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/1dcc7b0af4c3f0a2753df98f/kabupaten-kolaka-timur-dalam-angka-2025.html

Brata, J. T., Bariun, L. O., Nashar, A., I Wayan Puguh, & Sufrianto. (2023). Kebijakan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Sulawesi Tenggara. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 184–197. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.139

Fanani, Z., & Ahsani, N. Al. (2025). Konstruksi Sosial Moderasi Beragama: Analisis Teori Konstruktivisme Berger dan Luckmann dalam Komunikasi Keagamaan Indonesia. *Icon: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, *4*(1), 1–16.

Fauziyah, N. K., & Mahara, A. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Pemasaran Kopi Gayo dan Pemberdayaan Masyarakat. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, *3*(2). https://doi.org/10.22515/ajdc.v3i2.5600

Febriani, D. L., & Juliani, R. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 19–38. https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970

Juniarfah, S. (2023). *Pengaruh kearifan lokal bugis dan modernisasi pertanian*.

Kartomo, K., Sapriyadi, S., & Syam, S. F. (2023). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *23*(1), 259. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3235

Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Transaksi*, *11*(1), 80–89. http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477

Natasya, & Jers, T. (2024). *Ritual Maddoja Bine dalam Praktik Pertanian Padi : Studi Etnografi Maddoja Bine Ritual In Rice Farming Practices : An Ethnographic Study*. *8*(2), 195–209.

Nengah, N., Febriani, E., Yunus, L., & Zani, M. (2024). *Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Antara Suku Lokal dan Suku Transmigrasi Di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur*. *4*(2), 3491–3499.

Noviati, R. (2022). Migrasi Orang Bugis Dari Kolaka Timur Ke Kota Kendari. *Jurnal Kerabat Antropologi*, *6*(1), 1–16.

Rahmah, Y. (2021). *ANALISIS KOMUNIKASI STRATEGIS DESA KUMBANG SEBAGAI DUTA*

NTB TINGKAT NASIONAL DALAM PROGRAM DESA BENDERANG INFORMASI PUBLIK 2021 Yulia. 167–186.

Suryaalim, A. M. A., Sarwoprasodjo, S., & Pertamasari, R. B. (2019). Hibridisasi Ritus Tradisional sebagai Media Komunikasi Pembangunan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *16*(1), 30–42. https://doi.org/10.46937/16201825119

Syaputra, A., & S, Y. S. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung. *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, *8*(2), 38. https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i2.5296

Zainal, A. G., & Sarwoprasodjo, S. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan (Studi Program “Bupati Ronda” di Kabupaten Lampung Tengah). *Journal Of Communication Studies*, *3*(1), 54–66.

Zakariah, M. A., Zakariah, M., Haris, A., Zakariah, N., Dakwah, J., Pengembangan, D., & Desa, M. (2019). Sistem Pertanian Terpadu Pangan, Pakan, Pupuk dan Biogas di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur JURNAL AT-TAGHYIR. *Jurnal At-Taghyir*, *2*(1), 30–45.